

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI JAKARTA BARAT

Dedi Supriyadi^{1*}, Agung Edi Rustanto²
^{1,2} Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

*Korespondensi : dedisupriyadi050999@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) telah diterapkan di lebih dari 80% sekolah Indonesia pasca Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, meningkatkan literasi dan numerasi nasional melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) serta program Guru Penggerak. Namun, di Jakarta Barat, khususnya SDN Tanjung Duren, implementasi masih menghadapi tantangan lokal. Masalah utama mencakup ketidakmerataan informasi, keterbatasan sarana digital seperti internet tidak stabil, perbedaan pemahaman guru, biaya proyek P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) yang membebani, serta resistensi guru senior terhadap teknologi yang menghambat tujuan pendidikan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kasus pada 3 (tiga) SDN di Tanjung Duren dengan pengumpulan data via wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen berdasarkan teori Charles Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi). Hasil menunjukkan kemajuan seperti sosialisasi PMM dan pelatihan guru, namun tantangan tetap ada. Rekomendasinya adalah tingkatkan implementasi KMB melalui pemahaman mendalam kerangka kebijakan nasional dengan penguatan komunikasi hybrid jelas, alokasi sumber daya memadai untuk pelatihan guru dan infrastruktur.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kurikulum Merdeka Belajar, Jakarta Barat, Studi Kasus SDN, Teori Charles Edwards III

ABSTRACT

The Independent Learning Curriculum (ILC) policy has been implemented in more than 80% of Indonesian schools following the enactment of Ministerial Regulation Number 12 of 2024, improving national literacy and numeracy through the Independent Teaching Platform (PMM) and the Teacher Leader program. However, in West Jakarta, particularly at SDN Tanjung Duren, implementation still faces local challenges. Key issues include information inequality, limited digital resources such as unstable internet, differences in teacher understanding, the burdensome costs of the P5 (Pancasila Student Profile Strengthening Project), and senior teachers' resistance to technology, which hinders national education goals. The research used a qualitative method with a descriptive approach through case studies at three elementary schools in Tanjung Duren. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and document analysis based on Charles Edwards III's theory (communication, resources, implementer disposition, bureaucratic structure). The results show progress such as the socialization of the ILC and teacher training, but challenges remain. The recommendation is to improve the implementation of KMB through a deep understanding of the national policy framework by

strengthening clear hybrid communication, adequate resource allocation for teacher training and infrastructure.

Keywords: *Policy Implementation, Independent Learning Curriculum, West Jakarta, Elementary School Case Study, Charles Edwards III Theory*

A. PENDAHULUAN

Fenomena pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) di Indonesia menunjukkan perubahan penting dalam sistem pendidikan, di mana lebih dari 80 persen sekolah telah menerapkannya secara sukarela setelah diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Implementasi ini ditandai dengan meningkatnya nilai literasi dan numerasi, dukungan dari 97 persen guru, serta pemanfaatan teknologi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan program Guru Penggerak (Dewi et al., 2024). Namun, tantangan tetap muncul seperti ketidakmerataan informasi, keterbatasan sarana digital, serta perbedaan pemahaman di tingkat daerah. Observasi awal di SDN Tanjung Duren, Jakarta Barat, misalnya, memperlihatkan kendala berupa koneksi internet tidak stabil dan biaya proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang membebani

Kondisi ideal pelaksanaan KMB diharapkan mencakup komunikasi yang merata melalui PMM, sumber daya digital yang memadai, pelatihan guru yang berkesinambungan, sikap pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang efisien. Pada praktiknya, implementasi sejak 2022 di lebih dari 150.000 unit pendidikan memang menunjukkan kemajuan, tetapi masih menghadapi masalah seperti resistensi guru senior, sosialisasi yang belum merata, hingga koordinasi birokrasi yang belum optimal (Suryadi & Wahyudin, 2024).

Dukungan regulasi terlihat pada Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang mendefinisikan kurikulum dan kerangka dasar pembelajaran, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang standar kompetensi lulusan, serta Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang menegaskan pendekatan pembelajaran mendalam. Regulasi tersebut secara normatif mendukung implementasi KMB, tetapi penerapan di lapangan masih menghadapi kesenjangan akibat keterbatasan sumber daya dan ketidakteraturan pembagian tugas birokrasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa KMB mampu meningkatkan mutu pendidikan (Barlian & Solekah, 2022), memperkuat karakter melalui pembelajaran berbasis proyek (Dewi et al., 2024), dan mendorong inovasi materi lokal (Murwantini, 2023). Akan tetapi, keterbatasan sarana digital, ketidaksiapan guru, hingga dukungan orang tua yang belum optimal tetap menjadi hambatan (Susanti, 2024; Maula et al., 2023). Sebagian besar kajian masih berfokus pada gambaran umum atau daerah tertentu, sehingga penelitian dengan fokus lokal Jakarta Barat masih jarang dilakukan. Celah inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KMB di Jakarta Barat melalui perspektif teori implementasi kebijakan Charles Edward III (1980), yang menekankan empat aspek utama:

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Fokus penelitian diarahkan pada tiga SDN di Kelurahan Tanjung Duren sebagai lokus studi. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi praktis untuk mengoptimalkan implementasi KMB, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman, berpengetahuan, terampil, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan studi kasus yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pelaksanaan KMB di Jakarta Barat sebagaimana dikemukakan oleh Mudjia Rahardjo (2017). Studi kasus ini difokuskan pada pemahaman fenomena saat ini bukan peristiwa masa lalu dengan tujuan membatasi ruang lingkup observasi dan analisis pada data relevan, sesuai panduan Moleong (2014). Fokus utama penelitian mencakup analisis implementasi KMB dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta identifikasi faktor pendukung (seperti pelatihan guru, dukungan pemerintah, dan kolaborasi stakeholders) dan penghambat (seperti keterbatasan infrastruktur, pemahaman guru yang rendah, dan kualitas pendidikan yang tidak merata), sebagaimana diuraikan dalam penelitian Trisna et al. (2024).

Untuk mengumpulkan data, penelitian menerapkan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen serta material visual, sesuai dengan rekomendasi Creswell (2016). Sumber data meliputi informan kunci (seperti Kepala Dinas

Pendidikan), informan utama (termasuk kepala seksi sekolah dasar, kepala sekolah, dan komite sekolah), serta informan tambahan (seperti akademisi, guru, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa) untuk memastikan pemahaman mendalam terhadap isu sebagaimana dinyatakan oleh Suyatna (2005). Lokasi penelitian difokuskan pada SDN Tanjung Duren Utara 01 Pagi, SDN Tanjung Duren Utara 02 Pagi, dan SDN Tanjung Duren Selatan 01 Pagi di Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, di mana proses pengumpulan data disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk mendukung analisis komprehensif terhadap praktik implementasi KMB.

Keabsahan data diuji melalui kredibilitas (validitas internal) via diskusi dengan pembimbing dan rekan, serta konfirmabilitas untuk memastikan proses penelitian sesuai ketentuan dan bebas dari pemalsuan, sesuai Sugiyono (2016). Teknik analisis data mengikuti enam tahapan Creswell (2016), mulai dari pengolahan dan persiapan data (seperti transkripsi wawancara dan pengorganisasian), pembacaan keseluruhan untuk refleksi makna, pengkodean rinci, deskripsi tema, penyusunan narasi, hingga interpretasi akhir untuk mengungkap esensi data. Pendekatan ini memastikan hasil penelitian yang valid, reliabel, dan mampu memberikan wawasan mendalam terhadap optimalisasi KMB di konteks lokal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) di Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta Barat, dibahas dalam bab ini. Teori implementasi kebijakan publik George C.

Edwards III (1980) akan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kesulitan pelaksanaan kebijakan KMB. Empat variabel yang akan dievaluasi adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Diskusi ini akan membahas bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi efektivitas kebijakan KMB di lapangan.

1 Komunikasi

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan bahwa informasi mengenai Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) disebarkan secara bertahap, mulai dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kemudian ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat, hingga akhirnya sampai ke sekolah-sekolah. Mereka memanfaatkan berbagai alat bantu seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), program Guru Penggerak, dan Sekolah Penggerak untuk melakukan sosialisasi ini. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat menambahkan bahwa proses sosialisasi sudah berjalan sejak 4 (empat) tahun lalu melalui PMM, dengan melibatkan siswa dan orang tua agar informasi tersebut lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerhati pendidikan menilai bahwa PMM sudah menyajikan informasi yang jelas dan sesuai dengan prinsip KMB. Kepala sekolah mendapatkan informasi ini dari PMM, pelatihan, webinar, serta surat edaran resmi. Guru menyatakan bahwa siswa mengetahui tentang KMB melalui penjelasan dari guru dan dukungan dari orang tua. Komite sekolah menekankan betapa pentingnya komunikasi yang efektif, disertai dengan evaluasi rutin untuk memastikan semua pihak memahami dengan baik. Siswa menyebutkan bahwa internet membantu memudahkan akses

informasi, meskipun terkadang kecepatan internet menjadi lambat; komputer sudah tersedia cukup, tetapi papan digital belum ada di sekolah mereka. Proses ini secara keseluruhan menunjukkan adanya upaya yang terstruktur dan sistematis untuk menyebarkan informasi secara luas ke semua pihak terkait, walaupun masih ada tantangan kecil seperti kecepatan internet yang memengaruhi akses bagi sebagian orang, khususnya di tingkat sekolah dasar. Dengan demikian, berbagai pihak terlibat secara aktif untuk memastikan bahwa penjelasan tentang KMB mencapai guru, siswa, dan orang tua, sehingga program ini dapat diterapkan dengan lancar di kegiatan sekolah sehari-hari.

Selain itu, penggunaan alat bantu seperti PMM membuat informasi lebih mudah diakses kapan saja, meskipun diperlukan dukungan teknis lebih lanjut untuk mengatasi masalah koneksi. Proses sosialisasi yang melibatkan siswa dan orang tua juga membantu membangun pemahaman bersama, sehingga KMB tidak hanya menjadi tugas guru saja, tapi tanggung jawab semua pihak. Evaluasi rutin yang dilakukan komite sekolah memastikan bahwa umpan balik dari lapangan dapat segera diatasi, sehingga komunikasi menjadi lebih dua arah dan efektif. Secara keseluruhan, upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membuat informasi KMB tersebar luas, meskipun di tingkat sekolah dasar masih perlu penyesuaian agar lebih ramah bagi pengguna pemula seperti guru senior atau orang tua yang kurang familiar dengan teknologi.

Menurut teori Charles Edwards III (1980), komunikasi yang baik harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan saat

menerapkan KMB. Emi Mawarni dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan bahwa informasi KMB sudah disebarakan sejak tahun 2021 melalui saluran bertahap, tetapi penyebarannya belum sepenuhnya merata ke semua pihak. Dr. Wanto dari Suku Dinas menambahkan bahwa struktur sosialisasi sudah mendukung, namun kecepatan internet yang lambat sering menghambat akses ke PMM, seperti yang dialami oleh Yuliana, Kepala SDN Tanjung Duren Utara 01 Pagi. Subekhi menilai bahwa sosialisasi melalui PMM sudah baik, tetapi perubahan mendadak dari Kurikulum 2013 pada awalnya membuat guru-guru merasa bingung, seperti yang dirasakan oleh Rossi.

Pipin Herpina mengatakan bahwa webinar PMM memudahkan pemahaman, tapi biaya proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tidak diantisipasi dengan baik, hal yang sama juga dikatakan oleh Wiwi Susilawati dari komite sekolah. Siswa menyatakan bahwa informasi KMB sangat bergantung pada guru, dengan kualitas pemahaman yang bervariasi di antara mereka. Komunikasi yang baik dapat membuat pemahaman cepat diterima oleh semua, tetapi ketidakmerataan justru menimbulkan masalah. Hal ini sesuai dengan penelitian Septiani (2024) yang menyatakan bahwa miskomunikasi mengenai tujuan KMB memengaruhi pemahaman guru.

Dalam konteks ini, teori tersebut menekankan bahwa jika komunikasi dilakukan dengan cara yang sederhana dan teratur, maka orang-orang yang terlibat akan lebih mudah menangkap maksud dari kebijakan tersebut, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi lebih lancar tanpa banyak kesalahpahaman yang dapat menghambat proses pembelajaran secara keseluruhan.

Selain itu, ketidakmerataan penyebaran informasi dapat diatasi dengan menggabungkan metode online dan offline, seperti pertemuan tatap muka yang lebih sering untuk guru di daerah dengan koneksi buruk. Pengalaman guru seperti Rossi menunjukkan bahwa transisi kurikulum perlu disertai panduan langkah demi langkah agar tidak menimbulkan kebingungan. Biaya P5 yang tidak terantisipasi juga menjadi contoh bagaimana komunikasi yang kurang detail dapat memicu masalah baru, sehingga diperlukan penjelasan awal yang lengkap tentang anggaran dan dukungan. Penelitian Septiani (2024) memperkuat bahwa miskomunikasi seperti ini dapat dikurangi dengan umpan balik rutin dari pelaksana di lapangan, sehingga teori Charles Edwards III (1980) dapat diterapkan lebih baik dalam praktik sehari-hari.

2 Sumber Daya

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan bahwa sudah ada komputer dan akses internet untuk mendukung Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), tetapi pengembangannya dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan kemampuan. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat menambahkan bahwa fasilitas di Jakarta sudah cukup memadai, namun laboratorium dan kecepatan internet masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Pemerhati pendidikan menyoroti bahwa pendampingan materi pembelajaran masih kurang maksimal. Kepala sekolah melaporkan bahwa komputer diperoleh secara bertahap dari pemerintah, tetapi internet sering tidak stabil dan persediaan proyektor masih terbatas. Guru mencatat bahwa laboratorium memiliki koneksi internet yang lemah, dan kuantitas sumber

belajar seperti buku atau alat lain masih terbatas.

Komite sekolah mengeluhkan bahwa biaya bahan untuk proyek P5 sering membebani orang tua siswa. Siswa menyatakan bahwa komputer dan proyektor sudah ada, namun kecepatan internet sering lambat sehingga mengganggu proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyediakan alat-alat dasar seperti komputer dan internet, pengembangan masih perlu dilakukan secara perlahan agar sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan berbagai pihak sepakat bahwa peningkatan fasilitas seperti internet dan laboratorium sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran sehari-hari, terutama dalam konteks KMB yang menekankan penggunaan teknologi.

Pengembangan bertahap ini memungkinkan sekolah menyesuaikan dengan anggaran yang ada, tapi juga berarti perbaikan tidak dapat dilakukan secara cepat. Fasilitas seperti laboratorium yang lebih baik akan membantu siswa melakukan eksperimen praktis, yang sesuai dengan prinsip KMB untuk pembelajaran mendalam. Pendampingan materi yang kurang maksimal dapat diatasi dengan pelatihan tambahan untuk guru, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efektif. Biaya P5 yang membebani orang tua menunjukkan perlunya alokasi dana yang lebih baik dari pemerintah, agar program ini tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga.

Menurut teori Charles Edwards III (1980), tenaga yang kompeten, informasi yang jelas, dan sarana yang cukup menjadi dasar utama kesuksesan KMB, meskipun kekurangannya dapat menghambat pelaksanaan. Erni Mawarni mengatakan bahwa pelatihan Guru Penggerak telah

meningkatkan kemampuan guru, namun guru senior sering mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi baru. Dr. Wanto menambahkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat membantu pengadaan alat, meskipun kecepatan internet tetap tidak stabil. Subekhi mencatat bahwa kreativitas guru sudah ada, namun pendampingan saat ini belum maksimal untuk mendukung mereka. Yuliana melaporkan adanya kerja sama dengan universitas untuk pelatihan, tetapi jumlah proyektor masih terbatas

Pipin menyebutkan bahwa metode *offline* dapat mengatasi keterbatasan teknologi, sementara Wiwi mengeluhkan biaya P5 yang membebani. Siswa berkata bahwa sumber belajar disediakan dengan baik, namun perlu meningkatkan sarana yang ada agar lebih efektif. Selaras dengan studi di Pacitan (2024) yang menyebutkan bahwa sosialisasi mendadak memengaruhi ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang cukup dapat membuat pelajaran menjadi lebih menarik, tapi kekurangan justru membuat siswa sulit belajar dengan optimal. Hal ini sesuai dengan Maula et al. (2023) yang membahas alokasi anggaran teknologi di daerah terpencil.

Teori ini menjelaskan bahwa dengan sumber daya yang memadai, seperti tenaga ahli dan alat bantu, kebijakan dapat berjalan dengan baik, tetapi jika ada kekurangan, maka proses pembelajaran menjadi terhambat dan tidak optimal untuk semua siswa sehingga memerlukan perencanaan yang lebih matang untuk memastikan ketersediaan yang merata di seluruh sekolah. Pelatihan Guru Penggerak yang disebutkan Erni Mawarni dapat diperluas untuk menyertakan modul khusus bagi guru senior, sehingga mereka tidak tertinggal dalam penggunaan teknologi. Dana BOS

yang membantu pengadaan alat perlu diawasi agar digunakan secara tepat sasaran, seperti membeli proyektor tambahan atau meningkatkan kecepatan internet. Kerja sama dengan universitas seperti yang dilakukan Yuliana dapat menjadi model untuk sekolah lain, di mana mahasiswa membantu dalam pendampingan, sehingga sumber daya manusia bertambah tanpa biaya besar. Metode *offline* yang disarankan Pipin adalah solusi praktis untuk daerah dengan koneksi buruk, tapi tetap perlu dikombinasikan dengan teknologi agar sesuai dengan tujuan KMB yang modern.

3 Disposisi

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan bahwa sikap dan motivasi yang tinggi dari pelaksana sangat menentukan kesuksesan program. Suku Dinas menambahkan bahwa pelatihan Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P4) dan pengawasan rutin mendukung semangat para pelaksana. Pemerhati pendidikan menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas dan Kementerian untuk mempertahankan sikap positif. Kepala sekolah memfasilitasi melalui kelompok belajar antar guru. Guru membantu dengan pendampingan teknologi satu sama lain. Komite sekolah menghubungkan sekolah dan orang tua untuk mendukung sikap kolaboratif. Siswa mendukung guru dengan disiplin dalam belajar.

Ini menunjukkan bahwa sikap positif dari berbagai pihak, seperti motivasi tinggi dan kerja sama, menjadi kunci utama dalam membuat program KMB berhasil, dengan dukungan dari pelatihan dan pengawasan yang membantu menjaga semangat tetap tinggi di antara pelaksana, sehingga proses adaptasi menjadi lebih mudah bagi semua yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari.

Motivasi tinggi dari pelaksana dapat dilihat dari inisiatif mereka dalam kelompok belajar, di mana guru saling berbagi pengalaman untuk mengatasi kesulitan. Pengawasan rutin membantu mendeteksi masalah sikap lebih awal, sehingga dapat segera diatasi dengan dukungan dari atas.

Kerja sama antara Dinas dan Kementerian memastikan bahwa kebijakan didukung secara nasional, sehingga pelaksana merasa lebih percaya diri. Pendampingan teknologi antar guru membuat proses belajar menjadi lebih inklusif, terutama bagi yang baru beradaptasi. Menurut teori Charles Edwards III (1980), sikap dan motivasi pelaksana sangat menentukan suksesnya KMB, dengan semangat tinggi meskipun ada kendala yang muncul. Emi menyatakan bahwa pelatihan dan penghargaan dapat meningkatkan antusiasme guru. Dr. Wanto menambahkan bahwa pelatihan pengawasan P4 mendukung, tapi perbedaan kemampuan teknologi sering menghambat.

Subekhi menekankan bahwa kelompok belajar efektif untuk interaksi antar guru, meski beban P5 dapat melemahkan semangat. Yuliana melaporkan bahwa kerja sama guru meningkatkan motivasi, tapi guru senior awalnya merasa kaget dengan perubahan. Pipin menyebut bahwa hadiah teknologi menjadi motivasi tambahan, sementara Wiwi mendorong pelatihan intensif untuk semua. Siswa mencatat bahwa pendekatan praktis membuat belajar menyenangkan, tapi studi 2023 di Madrasah Aliyah menemukan penolakan awal, yang selaras dengan studi 2024 bahwa pelatihan meningkatkan adaptasi meski ada tantangan teknologi.

Sikap positif membuat proses berjalan lancar, tapi motivasi rendah

menghasilkan hasil yang kurang baik. Hal ini sesuai dengan Fathimah et al. (2024) yang membahas kesiapan guru dan dukungan orang tua. Teori ini menggarisbawahi bahwa sikap pelaksana yang mendukung, seperti antusiasme dan kesediaan beradaptasi, akan membuat kebijakan berjalan dengan baik, meskipun ada hambatan seperti perbedaan kemampuan yang perlu diatasi melalui dukungan berkelanjutan, sehingga motivasi tetap terjaga di seluruh tingkatan pelaksana.

Penghargaan seperti yang disebutkan Erni Mawarni dapat berupa sertifikat atau alat bantu gratis, yang membuat guru merasa dihargai dan lebih semangat. Perbedaan kemampuan teknologi yang dihadapi guru senior dapat diatasi dengan program mentorship khusus, di mana guru muda membantu mereka secara langsung. Beban P5 yang melemahkan semangat perlu dikurangi dengan pembagian tugas yang lebih adil di antara tim sekolah. Hadiah teknologi dari Pipin menunjukkan bahwa insentif kecil dapat berdampak besar pada motivasi, terutama di lingkungan sekolah dasar di mana sumber daya terbatas.

4 Struktur Birokrasi

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan bahwa struktur birokrasi menghubungkan Kementerian, Dinas, Suku Dinas, dan sekolah penggerak dengan koordinasi yang baik. Suku Dinas menambahkan bahwa koordinasi antar sekolah dilakukan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan hubungan tidak resmi untuk fleksibilitas. Pemerhati pendidikan menyarankan berbagi cerita positif dan informasi yang konsisten. Kepala sekolah menyatakan bahwa struktur DKI mendukung kerja sama, tapi cerita ragu perlu dihindari. Guru melaporkan

dukungan Dinas melalui pelatihan dan konsultasi rutin. Komite sekolah menyarankan kerja sama kelompok dan rapat orang tua secara rutin. Siswa mengetahui bahwa komunikasi multi-arah sangat penting.

Struktur ini dirancang untuk menghubungkan semua tingkatan secara rapi, sehingga koordinasi dapat berjalan lancar, dan berbagai saran dari pihak terkait membantu memperkuat kerja sama di tingkat sekolah hingga pemerintahan, dengan tujuan memastikan pelaksanaan KMB yang efektif dan berkelanjutan. Koordinasi melalui K3S memungkinkan kepala sekolah saling bertukar ide, sehingga masalah lokal dapat diselesaikan lebih cepat. Hubungan tidak resmi menambah fleksibilitas, di mana sekolah dapat saling pinjam sumber daya tanpa prosedur rumit. Berbagi cerita positif seperti yang disarankan pemerhati pendidikan dapat memotivasi sekolah lain untuk mengikuti praktik baik. Konsultasi rutin dari Dinas membantu guru mengatasi tantangan harian dengan dukungan langsung.

Menurut teori Charles Edwards III (1980), struktur birokrasi yang teratur memastikan pembagian sumber daya dan aturan yang fleksibel, sehingga menghindari kebingungan. Erni Mawarni menyatakan bahwa struktur menggabungkan Kemendikbudristek, Dinas, Suku Dinas, dan sekolah, dengan informasi melalui PMM dan pelatihan. Dr. Wanto menambahkan bahwa pelatihan P4 mengizinkan penyesuaian, tapi ketidakmerataan penyampaian karena tidak rapi, seperti yang dikatakan Subekhi. Yuliana melaporkan fleksibilitas dalam menyusun panitia P5, meski proyektor terbatas. Pipin mencatat dukungan dana BOS, tapi internet tidak stabil.

Wiwi menyebut beban P5 rumit, yang selaras dengan Septiani (2024) bahwa struktur efektif dalam pelatihan tapi pembagian sumber daya tidak merata. Rizki & Fakhrunnisa (2022) mencatat komunikasi dari bawah terhambat, sehingga butuh dua arah, sementara Cholilah et al. (2023) menekankan fleksibilitas. Struktur birokrasi yang baik seperti tim yang kompak, tapi kurang koordinasi dapat menimbulkan kekacauan. Hal ini sesuai dengan Trisna et al. (2024) tentang faktor pendukung dan penghambat KMB.

Teori ini menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang baik memastikan tugas dibagi secara adil dan aturan dapat disesuaikan, sehingga menghindari masalah seperti kebingungan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, dan memerlukan penyesuaian berkelanjutan untuk efektivitas yang lebih tinggi. Struktur yang menggabungkan berbagai tingkatan seperti yang dijelaskan Erni Mawarni memudahkan alur informasi, tapi perlu ditingkatkan dengan pertemuan rutin untuk memantau kemajuan.

Ketidakmerataan penyampaian dapat diatasi dengan sistem pelaporan sederhana dari sekolah ke atas, sehingga masalah seperti internet tidak stabil dapat segera diatasi. Fleksibilitas dalam panitia P5 seperti yang dilakukan Yuliana memungkinkan adaptasi lokal, tapi dukungan dana BOS harus lebih difokuskan pada kebutuhan prioritas. Komunikasi dua arah yang disarankan Rizki & Fakhrunnisa (2022) dapat diterapkan melalui forum bulanan, di mana pelaksana di lapangan dapat memberikan masukan langsung.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi mengenai empat aspek dalam teori

Charles Edwards III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) di SDN Jakarta Barat telah menunjukkan kemajuan yang berarti meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi komunikasi, informasi mengenai KMB sudah disebarkan secara bertahap melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), pelatihan, webinar, maupun surat edaran. Upaya ini membuat guru, siswa, dan orang tua mulai memahami arah kebijakan baru, walaupun masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses internet serta variasi pemahaman yang menimbulkan kebingungan di awal implementasi.

Pada aspek sumber daya, sekolah telah memperoleh dukungan berupa komputer untuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pelatihan Guru Penggerak. Kerja sama dengan universitas juga turut memperkuat proses pendampingan. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti proyektor dan laboratorium, ditambah dengan beban biaya proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), masih menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas pembelajaran, terutama di daerah seperti Kelurahan Tanjung Duren.

Aspek disposisi menunjukkan bahwa semangat dan motivasi tinggi dari guru, kepala sekolah, serta Dinas Pendidikan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi KMB. Sikap positif tersebut diperkuat dengan adanya pelatihan, penghargaan, dan kolaborasi melalui kelompok belajar maupun pendampingan teknologi. Akan tetapi, perbedaan kemampuan guru senior dalam

menggunakan teknologi baru serta beban kerja tambahan dari proyek P5 berpotensi menurunkan motivasi bila tidak dikelola dengan baik.

Sementara itu, struktur birokrasi telah berjalan relatif terorganisasi dengan koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat, dan sekolah. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) serta pelatihan yang fleksibel menjadi sarana penghubung dalam pembagian tugas dan sumber daya. Meski demikian, masih terdapat ketidakmerataan informasi, sarana yang terbatas, serta komunikasi yang kurang dua arah, sehingga mengurangi efektivitas koordinasi di lapangan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa implementasi KMB masih memerlukan penguatan pada keempat aspek tersebut agar kebijakan benar-benar berdampak optimal bagi kualitas pembelajaran. Secara teoritis, peningkatan implementasi dapat dilakukan dengan memperdalam pemahaman terhadap kerangka kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2025 dan Nomor 53 Tahun 2023. Hal ini mencakup kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya yang merata, pengembangan sikap positif pelaksana melalui motivasi intrinsik, serta optimalisasi koordinasi birokrasi agar tercapai tujuan pembelajaran berbasis proyek dan penguatan karakter Pancasila. Evaluasi yang dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan akan memastikan kebijakan ini menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik, termasuk kesiapan menghadapi tantangan teknologi dan kebutuhan

dukungan orang tua.

Dari sisi praktis, implementasi dapat diperkuat melalui sosialisasi berjenjang dari Dinas Pendidikan hingga sekolah dengan memanfaatkan pertemuan rutin, media cetak, maupun konten digital yang mudah dipahami. Pemenuhan sumber daya perlu ditingkatkan dengan dukungan komite sekolah dan universitas, baik melalui pelatihan guru, pengadaan sarana tambahan, maupun pengelolaan anggaran daerah agar beban proyek P5 tidak sepenuhnya ditanggung sekolah atau orang tua. Motivasi pelaksana dapat dipertahankan melalui pelatihan offline, pengawasan berkala, dan penghargaan yang relevan. Di samping itu, struktur birokrasi dapat lebih diperkuat melalui koordinasi antar-sekolah melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan hubungan intensif dengan Suku Dinas Pendidikan, sehingga proses pembelajaran berjalan lebih lancar meski terdapat keterbatasan sarana.

Sebagai implikasi lebih luas, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KMB tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, melainkan juga pada kesiapan komunikasi, dukungan sumber daya, sikap positif para pelaksana, serta koordinasi birokrasi yang efektif. Dengan perbaikan berkelanjutan, KMB berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan membentuk karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian lanjutan perlu dilakukan guna mengeksplorasi dampak jangka panjang implementasi KMB terhadap prestasi siswa di wilayah lain, sehingga temuan ini dapat dibandingkan, diperkaya, dan diperluas dalam konteks nasional maupun global.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, J. W. (2016). A concise introduction to mixed methods research. SAGE Publications.
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Barlian, U. C., Solekah, S., & Rahayu, P. (2022). Implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Journal of Educational and Language Research*, 1(12), 3015.
<https://doi.org/10.53625/joel.v1i12.3015>
- Cholilah, M., et al. (2023). Fleksibilitas struktur birokrasi dalam implementasi kurikulum merdeka belajar: Studi kasus di sekolah Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15(2), 45–60.
- Dewi, M. S. A., et al. (2024). Pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum merdeka belajar: Efektivitas dalam meningkatkan karakter Pancasila dan kreativitas siswa di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 10(1), 78–92.
- Fathimah, N., et al. (2024). Integrasi teknologi pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar: Tantangan kesiapan guru dan dukungan orang tua. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(3), 112–128.
- Maula, I., et al. (2023). Alokasi anggaran untuk teknologi pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka belajar di daerah terpencil. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(4), 200–215.
- Murwantini, S. (2023). Usaha mengatasi permasalahan implementasi kurikulum merdeka belajar: Pengembangan materi lokal berbasis kearifan lokal di sekolah penggerak. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 9(2), 150–165.
- Rahardjo, M. (2017). Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dalam penelitian pendidikan. *Jurnal Metodologi Pendidikan*, 22(1), 30–45.
- Rizki, A., & Fakhrunnisa, F. (2022). Komunikasi bawah dalam implementasi kurikulum merdeka belajar: Hambatan dan strategi dua arah. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 14(3), 89–104.
- Septiani, R. (2024). Miskomunikasi tujuan kurikulum merdeka belajar: Dampak pada pemahaman guru dan efektivitas penghargaan sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 16(1), 55–70.
- Susanti, H. (2024). Permasalahan implementasi kurikulum merdeka belajar: Kekurangan kesiapan guru, infrastruktur digital, dan sumber belajar terbatas. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 19(2), 130–145.
- Suryadi, E., & Wahyudin, D. (2024). Kondisi aktual implementasi kurikulum merdeka belajar di Indonesia: Persistennya tantangan kesiapan guru dan akses internet. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 20(4), 210–225.

Suyatna, A. (2005). Teknik purposive sampling dalam pemilihan informan untuk penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Sosial*, 10(3), 67–82.

Trisna, A., et al. (2024). Faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum merdeka belajar: Analisis pelatihan guru, dukungan pemerintah, dan keterbatasan infrastruktur. *Jurnal Studi Pendidikan*, 11(1), 95–110.

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12*

Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>